

Evaluasi Pengendalian Pencemaran Air di Sungai Batang Arau Kota Padang

Hendri Purnama Putra¹, Nora Eka Putri²

¹²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: hendripurnamanjr@gmail.com noraekaputri@fisunp.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) evaluasi pengendalian pencemaran air di Sungai Batang Arau Kota Padang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang 2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengendalian pencemaran air di Sungai Batang Arau Kota Padang. Metode penelitian desain sederhana digunakan untuk menganalisis penelitian quasi kualitatif Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data. Hasilnya menunjukkan bahwa: pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Batang Arau Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum cukup berhasil dalam mengendalikan pencemaran air di Sungai Batang Arau Kota Padang. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pencemaran air Sungai Batang Arau masih belum ditangani dengan baik. dalam mencapai tujuan pengendalian pencemaran air. Pelaksanaan belum efisien karena penggunaan sarana yang ada belum berhasil menghasilkan hasil yang diharapkan. Pelaksanaan belum cukup berhasil dalam memecahkan masalah pencemaran. Sarana dan prasana belum terdistribusi secara merata. Pelaksanaan pengendalian belum dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Pemberian sanksi sudah cukup tepat dalam melakukan proses pembinaan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pengendalian pencemaran air di Sungai Batang Arau Kota Padang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum terlaksana dengan baik sehingga diharapkan ada perbaikan dalam pelaksanaannya kedepan.

Kata kunci: *Evaluasi, Pengendalian Pencemaran Air*

Abstract

This investigation seeks to ascertain: 1) evaluation of water pollution control in Batang Arau River in Padang City by the Padang City Environment Agency 2) supporting and inhibiting factors in controlling water pollution in Batang Arau River in Padang City. This research was processed with quasi qualitative analysis techniques with simple research design methods. The methods of gathering data that were employed were observations, interviews, and documentation studies. The study's findings show that: the implementation of water pollution control in the Batang Arau River in Padang City

carried out by the Padang City Environment Agency has not been successful enough in controlling water pollution in the Batang Arau River in Padang City. This research shows that the implementation of Batang Arau River water pollution control has not been effective in achieving the objectives of water pollution control. Implementation has not been efficient because the use of existing resources has not succeeded in achieving the expected results. Implementation has not been successful enough in solving pollution problems. Facilities and infrastructure have not been evenly distributed. Implementation control has not been able to satisfy the needs of the community. Sanctioning is quite appropriate in carrying out the coaching process. The conclusion of this study shows that the evaluation of water pollution control in Padang City's Batang Arau River by the Padang City Environment Agency has not been completed. Padang City by the Since the Padang City Environment Agency has not been adequately implemented, it is anticipated that improvements in its implementation in the future.

Keywords : *Evaluation, Water Pollution Control*

PENDAHULUAN

Air adalah elemen yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan seluruh manusia. Manusia tidak akan dapat bertahan hidup tanpa air sebagaimana idealnya. Salah satu sumber daya alam yang digunakan seluruh makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup adalah air. Bahkan bukan hanya untuk menghidupi makhluk hidup, air juga dibutuhkan untuk dapat menjalankan pertanian, industri dan lain sebagainya. Maka dari itu, penting bagi seluruh makhluk hidup untuk dapat menjaga kualitas air (Fauzia 2020:1).

Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang sudah bertahun-tahun tak terselesaikan di daerah-daerah perkotaan di seluruh Indonesia. Pencemaran air adalah salah satu masalah pencemaran yang terjadi sangat banyak di seluruh perkotaan di Indonesia. Dari laporan data BPS tahun 2021, kasus pencemaran air terjadi sebanyak 10.683 kasus, pencemaran air ini menjadi masalah pencemaran lingkungan tertinggi dibandingkan pencemaran tanah dan udara.

Pencemaran air tampaknya menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang. Kota Padang sendiri telah menjadi pusat perekonomian, industri dan wisata sejak dahulu. Dari laporan BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menunjukkan bahwa Kota Padang merupakan kota dengan jumlah industri besar dan sedang tertinggi dengan jumlah 60 di Provinsi Sumatera Barat. Dengan jumlah industri dan penduduk yang hampir satu juta jiwa membuat Kota Padang menjadi market yang besar bagi pelaku usaha dan industri. Banyaknya jumlah penduduk ini tentunya juga akan mempengaruhi banyaknya limbah sampah yang dapat dihasilkan.

Kota Padang dikenal memiliki banyak Daerah Aliran Sungai (DAS). Menurut informasi yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik Kota Padang (BPS, 2023) didapatkan informasi bahwa terdapat sekitar 21 sungai yang berada di Kota Padang. Dari keseluruhan sungai yang berada di Kota Padang, mulai dari Sungai Batang

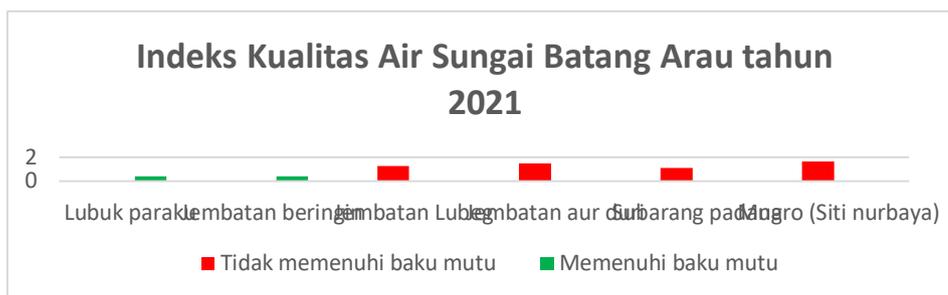
Kuranji, Air dingin, Batang Kandis, hingga Batang Arau pada umumnya telah mengalami pencemaran air. Sungai-sungai ini membentang di pertengahan kota, pusat industri, pusat wisata dan perumahan penduduk sehingga potensi tercemarnya sangat tinggi.

Salah satu sungai yang terkenal di Kota Padang adalah Sungai Batang Arau, atau yang biasa disebut dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) ARAU, memiliki luas 17.467 hektar, membentang dari Lubuk Peraku di hulu hingga Muaro di hilir (Jamilah 2020). Daerah Aliran Sungai Batang Arau sendiri terkenal karena sungai ini menjadi salah satu sungai yang sangat dipadati pemukiman penduduk di sepanjang alirannya. Selain itu, sungai ini juga membentang melintasi berbagai kelurahan di kota Padang, termasuk kawasan perindustrian di kota Padang, disana ada PT Semen terbesar di Sumatera, ada pabrik karet, perusahaan air minum, beberapa pabrik dan kegiatan industri lain, serta beberapa rumah sakit, dan kantor. Ini tentu mengakibatkan hilir Sungai Batang Arau yang bermuara di muaro dekat destinasi wisata Gunung Padang ini menjadi sangat beresiko dan berpotensi tercemar. Hal ini terjadi karena kepadatan pemukiman yang membuat potensi pembuangan sampah ke sungai semakin tinggi, serta pembuangan limbah industri ke sungai.

Penelitian Tim Ekspedisi Sungai Nusantara bersama WALHI Sumatera Barat menemukan bahwa sampah mikroplastik telah mencemari Sungai Batang Arau Kota Padang. Hasil pengujian kualitas air di Sungai Batang Arau membuktikan bahwa temuan ini pasti memiliki korelasi dengan lokasi geografis sungai, yang melintasi berbagai wilayah pemukiman, perindustrian, pertambangan, dan perkebunan (Walhi, 2021)

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tahun 2021 diketahui bahwa indeks kualitas air Sungai Batang Arau sebagai berikut:

Grafik 1 Indeks Kualitas Air Sungai Batang Arau tahun 2021



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang 2021

Salah satu pedoman mengenai pengendalian pencemaran air tertuang dalam Pasal 11 Perda Nomor 3 Tahun 2006 yang menjabarkan cara pengendalian pencemaran air oleh pemerintah daerah seperti menetapkan kapasitas untuk menampung beban pencemaran sehingga sumber pencemaran dapat diidentifikasi dan diinventarisasi. Walaupun sudah memiliki pedoman dalam melakukan upaya

pengendalian pencemaran air, fakta yang ditemukan melalui observasi yang peneliti lakukan dan analisis dari data kualitas air Sungai Batang Arau, khususnya kecamatan Padang Selatan atau bagian hilir sungai, ditemukan banyaknya timbulan sampah, limbah cair, bangkai kapal, hingga kualitas air Sungai Batang Arau yang tercemar. Ini tentu menandakan bahwa ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran sungai oleh Pemerintah Kota Padang. Permasalahan ini bisa saja berasal dari kebijakan yang ada belum efektif dalam mengendalikan pencemaran, atau pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Padang yang belum maksimal.

Dengan segala peraturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan ataupun pengendalian pencemaran air yang sudah ada, sudah seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik terhadap pencemaran Sungai Batang Arau. Namun, realisasi dari tujuan kebijakan-kebijakan ini yang sampai sekarang belum terlaksana dengan optimal, sehingga sampai saat ini pencemaran air sungai Batang Arau belum benar-benar terkendali. Maka dari itu, berdasarkan fenomena, fakta dan data di atas penulis ingin meneliti permasalahan tersebut menjadi penelitian dengan judul “Evaluasi Pengendalian Pencemaran Air di Sungai Batang Arau Kota Padang”

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif semu (*quasi kualitatif*) dan menggunakan metode Desain Penelitian Sederhana (SRD). Metode ini terdiri dari lima tahapan: konteks sosial dan pertanyaan penelitian, peninjauan literatur, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan laporan (Bungin,2020). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui metode reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dikumpulkan di Evaluasi pengendalian pencemaran air di Sungai Batang Arau Kota Padang, penulis melihat evaluasi ini dengan teori evaluasi Dunn (2003: 608) yaitu:

1. Efektivitas

Indikator efektivitas berkenaan dengan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu dengan melihat sasaran dan arah kebijakan yang dengan melihat capaian akan tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengukur efektivitas dengan melihat tujuan dari Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan temuan dilapangan terkait pelaksanaan pengendalian pencemaran air oleh DLH Kota Padang sesuai tujuan dari Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2006 belum berjalan efektif dikarenakan kualitas air saat ini masih tercemar dan dalam kategori tidak baik untuk digunakan oleh masyarakat untuk peruntukan sehari-hari, malahan Sungai Batang Arau malah hanya diperuntukkan untuk membuang sampah dan limbah dari masyarakat, usaha mikro hingga usaha industri besar.

2. Efisiensi

Indikator efisiensi berkenaan dengan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan sarana yang tersedia untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jika penggunaan sumber daya dilakukan dengan seefektif mungkin sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka efisiensi dapat terjadi. Dalam penelitian ini peneliti melihat efisiensi dari penggunaan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melaksanakan pengendalian hingga pengawasan terhadap pencemaran.

Berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa DLH menggunakan petugas yang ada, anggaran, hingga sarana dan prasarana. Dari hasil temuan tersebut yang juga dilihat dari pencapaian tujuan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan sumber daya untuk mengendalikan pencemaran Sungai Batang Arau sudah cukup efisien. Hal ini disebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki anggaran yang terbatas, sumber daya manusia yang terbatas dan sarana dan prasarana yang belum mencukupi mengakibatkan tujuan dari pengendalian dan pengawasan tidak berjalan optimal. Namun, terkait pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik dilakukan dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang memiliki izin lingkungan. Ini menandakan bahwa efisiensi sumber daya sudah diterapkan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran Sungai Batang Arau.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan berkenaan dengan hasil yang dicapai dapat menyelesaikan masalah. Dalam kriteria ini penulis berfokus pada pemecahan masalah pemulihan kondisi air yang tercemar. Jika pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh DLH Kota Padang dapat memecahkan masalah pemulihan kondisi pencemaran air, maka kecukupan berhasil dilakukan.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum cukup berhasil dalam menyelesaikan masalah pemulihan kondisi air yang tercemar, karena kondisi air Sungai Batang Arau masih tercemar berat oleh limbah dan tidak bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan harian. Hal ini juga terjadi karena DLH hanya berfokus kepada pabrik besar dan sampah yang masuk ke sungai saja, padahal seharusnya ada kontrol yang ketat yang dilakukan oleh DLH terhadap sumber-sumber pencemaran lainnya.

4. Perataan

Indikator perataan berkenaan dengan sasaran atau objek dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan tanpa memihak kepada salah satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada seluruh sasaran kebijakan. Pada kriteria perataan ini peneliti berfokus pada distribusi sarana dan prasarana dan pelaksanaan pengawasan di sepanjang Sungai Batang Arau. Perataan dapat tercapai apabila Dinas Lingkungan Hidup dapat dengan adil mendistribusikan sarana dan prasarana, serta tidak tebang pilih dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dapat dijelaskan bahwa pendistribusian terhadap sarana dan prasarana tidak dibagi secara merata karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak adanya tempat pembuangan sampah, ataupun kontainer sampah. Sarana dan prasarana ini lebih banyak terpusat di kawasan wisata

yang ada di sekitar Jembatan Siti Nurbaya, sedangkan masyarakat yang tidak terlalu dekat dengan lokasi wisata, tidak mendapatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai dan mencukupi. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan juga sangat pasif dilakukan oleh DLH. DLH hanya bergerak ketika ada laporan saja, tapi tidak ada petugas yang ditempatkan untuk mengawasi perilaku usaha-usaha ataupun masyarakat yang berada di sepanjang Sungai Batang Arau

5. Responsivitas

Indikator responsivitas berkenaan dengan hasil pelaksanaan kebijakan apakah sudah dapat memuaskan kebutuhan dari sasaran kebijakan. Pada kriteria ini peneliti berfokus pada respon dari masyarakat dan pelaku usaha terkait pengelolaan sampah dan peran DLH dalam pengendalian sampah. Responsivitas dapat dilihat dari tanggapan masyarakat terkait dengan hasil kebijakan yang dilaksanakan oleh DLH Kota Padang

Berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa respon dari masyarakat tidak puas dengan kinerja yang dilakukan DLH dalam mengendalikan pencemaran, karena belum dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap pengelolaan sampah yang baik di sepanjang sungai. Tidak adanya sarana dan prasara, hingga minimnya peran DLH dalam melakukan intervensi terhadap permasalahan-permasalahan pengelolaan sampah yang ada di masyarakat dan pelaku usaha menjadi faktor tidak puasnya masyarakat sekitar Sungai Batang Arau.

6. Ketepatan

Indikator ketepatan berhubungan dengan hasil yang diinginkan benar benar dapat bermanfaat atau bernilai. Dalam kriteria ketepatan ini peneliti berfokus pada ketepatan DLH Kota Padang dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar hukum 89 lingkungan, khususnya yang melakukan pencemaran limbah ke Sungai Batang Arau. Ketepatan dapat tercapai apabila Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dapat menindak seluruh pelanggar dengan hukum yang ada tanpa pandang bulu.

Berdasarkan temuan dilapangan diketahui bahwa DLH Kota Padang sudah dua kali mengkasuskan masyarakat pelanggar hukum lingkungan dengan membuang sampah ke sungai dan dijerat dengan Perda Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dengan ancaman sanksi denda sampai dengan Rp5.000.000. Namun, hakim hanya memberikan denda Rp100,000 bagi pelanggar. Sedangkan untuk pelaku usaha, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang juga pernah memberikan sanksi administratif kepada pabrik karet yang membuat jalaur siluman untuk membuang limbahnya. Selain itu, juga ada pabrik ikan di kawasan pondok yang pernah ditutup sementara karena tidak mengindahkan sanksi teguran tertulis yang diberikan DLH Kota Padang. Jika dilihat dari hasil temuan maka Kecukupan terkait pemberian sanksi cukup baik walaupun untuk masyarakat terlalu didiskriminasi untuk didenda, sedangkan pelaku usaha tidak.

SIMPULAN

Melalui penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengendalian pencemaran air di Sungai Batang Arau Kota Padang dengan menerapkan teori

evaluasi dunn (2003: 608) yaitu: a.) Implementasi pengendalian pencemaran air Sungai Batang Arau belum efektif dalam mencapai tujuan-tujuan dari Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2006. b) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Batang Arau sudah cukup efisien dalam pengoptimalan sumber daya yang ada. c) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Batang Arau belum cukup berhasil dalam menyelesaikan masalah pemulihan kondisi pencemaran air Sungai Batang Arau d) Implementasi 3 yang masih belum massif dilakukan terhadap sumber-sumber pencemaran e) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Batang Arau belum mendapat respon yang positif dari sasaran kebijakan, karena dinilai belum berhasil menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan pengelolaan limbah. f) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Batang Arau sudah cukup memenuhi kriteria ketepatan dalam hal pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun, dari segi pembinaan masih terbilang diskriminatif kepada masyarakat yang sering diberi pembinaan dalam bentuk denda, sedangkan pelaku usaha hanya diberikan sanksi administratif tertulis terlebih dahulu. diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang agar dapat memperhatikan evaluasi-evaluasi terkait pengendalian pencemaran air Sungai Batang Arau, mendengarkan dan menanggapi setiap aspirasi masyarakat dan dapat berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* dalam melakukan pengendalian pencemaran air.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods:Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods Positivism - PostPositivism -96 Phenomenology - Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan*. Kencana Prenamedia Group.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Faridah, A. (2011). Evaluasi Pengendalian Pencemaran Udara Pt. Semen Padang, Indarung-Padang Dalam Rangka Program Proper. *Jurnal Teknik Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Fauzi, A. dkk (2022). *Metodologi Penelitian. Banyumas: CV. Pena Persada, 3*.
- Fauzia, Rahawarin. 2020. *Hukum Pidana Lingkungan; Pengelolaan Dan Pengendalian Kualitas Air Sungai Batu Merah Ambon. Lp2M lain Ambon 2020*.
- Jamilah, J., Berd, I., Herviyanti, H., Junaidi, J., & Nefilinda, N. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai di Kawasan DAS Batang Arau. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Dewantara*, 3(2 Septembe), 31-38.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*Lestari, T., dkk. (2022). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(2), 108-115.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia
- Walhi Sumbar. 2021. Laporan Observasi Persoalan Sampah dan Assesment Kebijakan Pengelolaan Sampah di Sepanjang Batang Arau